

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Keefektifan Implementasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang**

Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan mulai tahun 2013, sehingga sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Implementasi kebijakan ini dapat dilihat segi ketepatan kebijakan, ketepatan Pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

1. Ketepatan kebijakan,
  - Sejauh ini tingkat capaian pemecahan masalah implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang masih rendah, karena masih banyak kondisi pasar yang berantakan, masih ada pedagang yang berjualan tidak sesuai zonasinya, pemeliharaan bangunan pasar pun juga belum maksimal.
  - Kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter permasalahan yang ada di lapangan, karena kebijakan tersebut meliputi kegiatan pengaturan kawasan pasar dan pengaturan zonasi pasar, pengaturan

perizinan, penyelenggaraan pelayanan pasar, pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya, dan pemberdayaan pedagang pasar.

- Kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dan koordinasi dengan Dinas Pasar Kota Semarang sebagai pihak yang berwenang.
- Ketepatan kebijakan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.

2. Ketepatan pelaksana,

- Pelaksana kebijakan pengaturan pasar tradisional adalah Dinas Pasar kota Semarang, Dinas lain yang terkait serta organisasi pedagang pasar tradisional kota semarang.
- Pengaruh dari aktor-aktor dalam kebijakan pemanfaatan pasar di Kota Semarang masih kurang. Karena, kondisi kebersihan pasar masih belum terjaga, bangunan pasar yang sudah rusak dan parkir berantakan.
- Ketepatan pelaksana dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.

3. Ketepatan target,

- Target implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat yaitu pedagang pasar tradisional. Dapat dikatakan tepat karena locus dari kebijakan tersebut adalah pasar tradisional di Kota Semarang, jadi yang menjadi target kebijakannya adalah seluruh pedagang pasar tradisional di Kota Semarang.

- Pedagang masih belum siap untuk diintervensi karena banyak pedagang yang masih kurang peduli terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.
- Ketepatan target dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.

4. Ketepatan lingkungan,

- Lingkungan internal yang dilakukan antar aktor implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang diwujudkan dengan adanya koordinasi antar dinas terkait, namun koordinasinya masih kurang baik.
- Lingkungan eksternal
  - Masyarakat memiliki persepsi implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan memberikan dampak yang baik jika dilaksanakan dengan benar.
  - Pedagang menganggap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan merugikan pedagang, karena pemindahan lapak dagang dapat mengurangi pelanggan.
- Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.

5. Ketepatan proses,

- Proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang di mulai dari identifikasi, lalu sosialisasi baru kemudian pelaksanaan kebijakan.
- masyarakat dan pedagang masih belum memahami kebijakan pemanfaatan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, karena proses sosialisasinya kurang maksimal.
- Pedagang belum siap untuk melaksanakan kebijakan pengaturan pasar tradisional, karena harus pindah tempat berjualan dan harus mengurus beberapa hal untuk pelaksanaan kebijakan tersebut
- Ketepatan proses dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang belum tepat.

**5.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang**

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasar di Kota Semarang dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan, dapat dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, kondisi sosial politik dan ekonomi, serta standar dan sasaran kebijakan.

## 1. Komunikasi

- Transmisi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan tidak efektif. Karena masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan informasi.
- Kejelasan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan masih belum jelas. karena penyaluran informasi yang didapat oleh pedagang sudah melalui beberapa perantara yang memiliki daya tangkap dan penyampaian informasi dengan cara yang berbeda-beda.
- Konsistensi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan masih kurang. Pedagang jarang mendapatkan pengarahan dari pihak terkait.
- Komunikasi menjadi pengaruh negatif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

## 2. Sumberdaya

- Staf dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang memiliki kualitas yang sudah cukup baik, karena setiap staf sudah menguasai bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas, tapi jumlahnya masih kurang banyak karena tidak sebanding dengan jumlah pedagang yang sangat banyak.
- Sumberdaya informasi dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang No 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. Karena disitu dijelaskan mengenai kebijakan pemanfaatan pasar.

- Fasilitas dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dirasa masih kurang karena anggaran yang diberikan sangat terbatas.
- Sumberdaya menjadi faktor yang menjadi pengaruh buruk dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

### 3. Disposisi

- implementor kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah memberikan respon yang cukup baik. Karena selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- Sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah baik, ditandai dengan adanya komitmen, dedikasi, tanggungjawab dan ketegasan.
- Disposisi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

### 4. Struktur birokrasi

- SOP dalam proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dirasa sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Semarang dan sudah efektif.

- Prosedur birokrasi ditunjukkan dengan adanya koordinasi antar setiap bidang/organisasi. Namun masih harus ditingkatkan agar tidak ada kesalahpahaman.
- Struktur birokrasi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

#### 5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

- Dukungan dari segi sosial dalam proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah dengan adanya kelompok-kelompok sosial yang ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.
- Dukungan dari segi politik dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah berupa usulan anggaran dari anggota dewan kepada pemberi anggaran untuk pembangunan pasar di Kota Semarang.
- Segi ekonomi juga turut mendukung adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, karena dengan adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dapat membuat kondisi ekonomi di Kota Semarang meningkat.
- Kondisi sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang memberikan pengaruh positif dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

## 6. Standar dan Sasaran

- Standar dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah dengan adanya SOP dan sasaran kebijakannya adalah seluruh pedagang pasar di Kota Semarang.
- Tingkat kejelasan dan ukuran dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional.
- Masih adanya pedagang yang tidak mematuhi aturan dalam implementasi kebijakan pasar di Kota Semarang, membuat standar dan sasaran kebijakannya belum tercapai dengan baik.
- Standar dan sasaran kebijakan menjadi pengaruh negatif dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa masih ada hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### 5.2.1 Keefektifan Implementasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang

1. Dengan masih banyaknya kondisi pasar yang berantakan, masih ada pedagang yang berjualan tidak sesuai zonasinya dan pemeliharaan

bangunan pasar yang kurang, maka implementor harus sering melakukan monitoring ke seluruh pasar secara rutin sehingga dapat langsung diketahui apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan.

2. Setiap aktor memiliki tugas dan peran masing-masing, oleh karena itu setiap aktor harus meningkatkan pemahaman dalam tugas-tugasnya dan melakukan koordinasi kepada aktor lainnya agar maksimal dalam menjalankan tugasnya dan dapat meningkatkan perannya. Sehingga aktor tersebut memiliki pengaruh yang baik terhadap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.
3. Agar pedagang siap dalam menjalankan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang maka pemerintah harus memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pedagang dan memberikan jaminan bahwa dengan menjalankan kebijakan tersebut tidak akan merugikan pedagang.
4. Dalam lingkungan internal kebijakan harus mengadakan rapat rutin untuk membahas rencana-rencana dalam melaksanakan tugas. Sehingga koordinasi antar SKPD terkait dapat maksimal.
5. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kebijakan pengaturan pasar tradisional, maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi, dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan lembaga / organisasi yang dekat dengan masyarakat seperti kelurahan, RT/RW untuk

melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

### **5.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang**

1. Transmisi dalam komunikasi implementasi kebijakan pemanfaatan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang seharusnya dilakukan secara terdata, agar seluruh pedagang mendapatkan informasi. Jadi dalam penyebaran informasi ada data siapa saja yang sudah mendapat informasi dan siapa saja yang belum mendapatkan informasi, sehingga pedagang benar-benar mendapatkan informasi yang jelas. Untuk memperjelas informasi tersebut maka juga diperlukan adanya peningkatan komitmen implementor kebijakan dalam memberikan informasi secara rutin.
2. Dengan minimnya jumlah staf dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang maka perlu diadakannya peningkatan keahlian staf yang ada dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan.
3. Dalam struktur birokrasi harus ada kerjasama yang baik antar setiap bidang/organisasi. Oleh karena itu koordinasi antar setiap bidang/organisasi harus ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman.

4. Standar dan sasaran kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan dapat terpenuhi jika pedagang mau menaati peraturan, oleh karena itu implementor harus meningkatkan ketegasan dan menegakkan aturan yang ada.